

SKRIPSI

**PENGARUH HUBUNGAN INTERPERSONAL DAN KESADARAN POLITIK
TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI
DESA DAMEKA, KECAMATAN KATIKUTANA SELATAN,
KABUPATEN SUMBA TENGAH, NUSA TENGGARA TIMUR**



Disusun oleh:

Arlando Uumbu Pani

18520090

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA

2024



**PENGARUH HUBUNGAN INTERPERSONAL DAN KESADARAN POLITIK
TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI
DESA DAMEKA, KECAMATAN KATIKUTANA SELATAN,
KABUPATEN SUMBA TENGAH, NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAH STRATA 1 (S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Program
Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
“APMD”

Yogyakarta pada:



Hari : Selasa

Tanggal : 06 Februari 2024

Pukul : 12.00

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. RY Gatot Raditya, M.Si (Ketua Pembimbing)	
2. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si (Penguji 1)	
3. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si (Penguji 2)	



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arlando Umbu Pani

NIM : 18520090

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “PENGARUH HUBUNGAN INTERPERSONAL DAN KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA” hasil kerja sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan saya rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, Mei 2024



Arlando Umbu Pani

18520090

MOTTO

“Jangan Pernah Ragu dengan Apa yang Kamu doakan”

(Markus 11 : 24)

“Berani Bermimpi Berani Mewujudkan”

“Tuhan tidak akan pernah membawamu sampai sejauh ini hanya untuk sebuah kegagalan”

(Ubbu_Lakeda)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaan dan hikmat yang diberikan saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Hubungan Interpersonal dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa” dengan baik. Untuk itu, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu memberikan hikmat dan kesehatan
2. Keempat orang tua saya yaitu Bapak Yonathan Umbu Gauka dan Ibu Rambu Luba Dekki yang telah melahirkan saya dan Bapak Reku Dedu dan Ibu Ril Rambu Kabida yang telah membesarkan saya dengan sepenuh hati
3. Kk Eni dan Keluarga, Kk Rabbu dan Keluarga, Kk Minda, dan Adik saya Andika, Eksan, Eky, dan Enol yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materi
4. Keluarga Besar Tanarara dan Wisukapeta yang selalu mendukung dan memberikan support
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 18 Gailaru Marada dan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta
6. Irene Rambu Rima dan Kakak Ubbu Lakeda yang selalu memberikan nasihat dan dorongan
7. Bapak Drs. Raden Yulianus Gatot Radiya, M.Si yang selalu memberikan masukan dan pengarahan
8. Untuk teman-teman saya Iyan, Ama, Willi, Arto, Nando, Aydos, Kraton, Brando, dan Adik saya Ridwan, Ipin, Eka, Emil, Yepsi, Naldy, Romy, dan Umbu Sulung yang selalu memberikan masukan dan support
9. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan kontribusi yang sudah diberikan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena perlindungan dan rahmat Tuhan saya bisa selesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Hubungan Interpersonal dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa” dengan baik. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Dr. Sutoro Eka Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta
3. Bapak Drs. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si selaku ketua program studi ilmu pemerintahan dan penguji
4. Bapak Drs. Raden Yulianus Gatot Radiya., M.Si selaku Dosen pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku penguji
6. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberi banyak ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
7. Seluruh karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pemerintah Desa dan Masyarakat Dameka yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk pengembangan penulisan lebih lanjutnya.

Yogyakarta, Mei 2024

Penulis

Arlando Umbu Pani

INTI SARI

Permasalahan yang terjadi di Desa Dameka adalah masyarakat wajib pilih kurang memiliki kesadaran politik yang baik sehingga memilih calon Kepala Desa bukan berdasarkan kemauan pribadi tetapi berdasarkan kemauan kelompok. Permasalahan kedua yang terjadi adalah adanya money politik, dan permasalahan ketiga adalah masyarakat wajib pilih akan dijanjikan jabatan yang pantas ketika mendukung dan memilih calon Kepala Desa tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh hubungan interpersonal dan kesadaran politik terhadap partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa di Desa Dameka Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh hubungan interpersonal dan kesadaran politik terhadap partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa di Desa Dameka Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur. Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat di Desa Dameka kurang memiliki kesadaran politik yang baik sehingga memilih calon Kepala Desa bukan berdasarkan kemauan pribadi tetapi berdasarkan kemauan kelompok.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang dengan teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh hubungan interpersonal dan kesadaran politik terhadap partisipasi pemilih dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Dameka, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh hubungan interpersonal dan kesadaran politik terhadap partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Dameka Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur. Hal ini terjadi karena semakin tinggi kesadaran politik dan hubungan interpersonal seorang calon kepala Desa dengan masyarakat maka semakin tinggi tingkat pemilih dalam pemilihan calon Kepala Desa sehingga kemenangan dalam proses pemilihan Kepala Desa juga akan semakin besar.

Kata kunci: Hubungan Interpersonal, Kesadaran Politik, Pemilihan Kepala Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Literature Review	6
F. Kerangka Konsep	8
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
H. Metode Penelitian	12
BAB II PROFIL DESA DAMEKA	17
A. Profil Desa Dameka	17
B. Kondisi Geografis dan Tofografi Desa Dameka.....	18
C. Kondisi Demografis	19
D. Sosial Budaya.....	20
E. Sarana dan Prasarana	20
F. Keadaan Ekonomi	21
G. Daftar Calon Kepala Desa Dameka Periode Tahun 2021-2026	22
H. Kondisi Lembaga Pemerintah Desa Dameka	22
BAB III ANALISIS DATA	28
A. Kesadaran Politik Masyarakat Desa Dameka	28

B.	Pengaruh Hubungan Interpersonal Terhadap Partisipasi Pemilihan Kepala Desa .	31
C.	Pengaruh Hubungan Interpersonal dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Pemili dalam Pemilihan Kepala Desa Dameka.....	34
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		38
A.	Kesimpulan	38
B.	Saran	39
DAFTAR PUSTAKA.....		40
LAMPIRAN.....		41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Informan	14
Tabel 2.1 Pergantian Kepemimpinan Desa Dameka	17
Tabel 2.2 Penggunaan Lahan Desa Dameka.....	19
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	19
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	20
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan yang dianut	20
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	21
Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Pendidikan	21
Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Peribadatan	21
Tabel 2.9 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Dameka.....	21
Tabel 2.10 Daftar Calon Kepala Desa Dameka Periode Tahun 2021-2026	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kondisi Geografis dan Tofografi Desa Dameka.....	18
Gambar 2.2 Struktur Pemerintahan Desa Dameka	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi dikenal sebagai bentuk pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat, baik dalam proses pembuatan keputusan politik, pemerintahan, maupun urusan negara. Sistem demokrasi rakyat memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dalam menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Abdulkarim (2007), pemerintahan yang menganut demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat atau minimal melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan politik, pemerintahan, atau hal-hal yang berkaitan dengan negara. Partisipasi politik merupakan aspek yang sangat esensial dalam demokrasi, yang menggambarkan penderitaan rakyat. Hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kelancaran sistem demokrasi. Apabila masyarakat aktif terlibat dalam partisipasi politik, maka proses pembangunan politik dan praktek demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan lancar. Tingkat partisipasi yang tinggi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan bangsa dan negara ini.

Asumsi dasar dari demokrasi adalah bahwa orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri, sehingga warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi politik merupakan wujud dari negara demokratis, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan partisipasi politik dapat dibagi menjadi dua, yaitu memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Partai politik memiliki peran penting dalam proses politik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Zona nyaman dapat terjadi jika partai politik tidak menjadi lokomotif dalam membangun negara untuk dapat menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, reformasi pola demokrasi dengan membuka ruang partisipasi masyarakat secara

lebih luas untuk turut terlibat dalam urun rembuk tata kelola pemerintahan daerah di tingkat terendah (kabupaten/kota), yang dikenal dengan demokrasi partisipasi, dapat membantu memperjuangkan kepentingan rakyat.

Di Indonesia, partisipasi politik dijamin oleh negara dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik. Pasal 28 UUD 1945 juga menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Negara melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara, termasuk hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, dan hak mendapatkan keadilan. Partisipasi politik warga negara seringkali dikaitkan dengan kegiatan mereka dalam memilih wakilnya maupun pemimpinnya dalam pemilihan umum yang diadakan oleh negara. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dianut Indonesia, di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak asal-usul yang bersifat istimewa seperti marga dan dusun. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan asal-usul daerah tersebut. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan NKRI. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari Kepala Desa. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih masyarakat desa yang sudah mempunyai hak memilih dan dipilih. Syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014. Kepala Desa ditetapkan melalui perolehan suara terbanyak dalam pemilihan yang nantinya dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 hari setelah proses pemilihan (Hafied, 2011).

Partisipasi politik masyarakat merupakan isu dan kajian yang menarik bagi kalangan pemerintahan, para akademisi, praktisi, dan profesional karena partisipasi politik masyarakat memiliki hubungan erat dengan keterlibatan masyarakat dalam upaya menciptakan iklim demokrasi di Indonesia. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi, di mana asumsi dasar dari demokrasi dan partisipasi adalah bahwa orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri, sehingga keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam proses politik dan ikut serta menentukan segala keputusan yang nantinya akan menyangkut dan mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik masyarakat dalam konteks demokrasi dapat ditunjukkan melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu). Partisipasi memiliki peranan yang penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara.

Partisipasi politik masyarakat merupakan isu dan kajian yang menarik bagi kalangan pemerintahan, para akademisi, praktisi, dan profesional karena partisipasi politik masyarakat memiliki hubungan erat dengan keterlibatan masyarakat dalam upaya menciptakan iklim demokrasi di Indonesia. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi, di mana asumsi dasar dari demokrasi dan partisipasi adalah bahwa orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri, sehingga keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam proses politik dan ikut serta menentukan segala keputusan yang nantinya akan menyangkut dan mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik masyarakat dalam konteks demokrasi dapat ditunjukkan melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu). Partisipasi memiliki peranan yang penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara.

Berdasarkan teori yang diacu, diketahui bahwa dalam pemilihan Kepala Desa sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan rusaknya hubungan kekeluargaan (Fajriani & Tenripadang, 2022). Permasalahan yang terjadi di Desa Dameka adalah masyarakat wajib pilih kurang memiliki kesadaran politik yang baik sehingga memilih calon Kepala Desa bukan berdasarkan kemauan pribadi tetapi berdasarkan kemauan kelompok. Permasalahan kedua yang terjadi adalah adanya *money* politik, dan permasalahan ketiga adalah masyarakat wajib pilih akan dijanjikan jabatan yang pantas ketika mendukung dan memilih calon Kepala Desa tertentu.

Berdasarkan uraian yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Hubungan Interpersonal dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Dameka Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Hubungan Interpersonal dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Dameka Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh hubungan interpersonal dan kesadaran politik terhadap partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Dameka Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis. Penjabaran dua manfaat ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Untuk memberikan informasi, masukan dan pemikiran. Agar dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan dan juga bisa dijadikan acuan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah serta masyarakat agar dapat mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berkualitas.

E. Literature Review

Penelitian yang dilakukan oleh Fajriani & Tenripadang tahun 2022 dengan judul dampak pemilihan Kepala Desa terhadap hubungan kekeluargaan di desa lera kecamatan wotu kabupaten luwu timur perspektif siyasah syar'iyah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemilihan kepala desa terhadap sistem kekeluargaan di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dan hasil yang didapatkan adalah Sistem pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung merupakan sistem yang telah berlangsung sejak lama, bahkan jauh sebelum presiden dipilih secara langsung. Berbagai permasalahan dalam proses pemilihan selalu mewarnai proses demokratisasi di level pemerintahan paling bawah tersebut. Kekecewaan dari pendukung calon yang kalah dapat berakibat pada tindakan kekerasan, dan kondisi tersebut dapat merusak jalinan kekeluargaan yang menjadi salah satu ciri masyarakat pedesaan. Renggangnya hubungan kekeluargaan sebagai akibat dari proses pemilihan kepala desa membutuhkan respon dan jalan keluar yang tepat, sehingga proses pemilihan dapat memberikan maslahat bukan sebaliknya.

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Salasa tahun 2018 dengan judul partisipasi politik dalam pemilihan Kepala Desa diketahui bahwa pemilihan kepala desa di Desa Gamomeng menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di desa sangatlah tinggi. Tetapi tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi itu disebabkan oleh salah satu kandidat dan timnya yang melakukan manipulasi data pemilih tetap (DPT) pada pemilihan kepala desa di Desa Gamomeng.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraini & Hisbullah tahun 2021 dengan judul eksistensi asas good governance dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa perspektif hukum tata negara islam. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi asas good governance dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa ditinjau dari Hukum Tata Negara Islam di Desa Bolang dan hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa proses

pemilihan kepala Desa di Desa Bolang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meskipun masih terdapat beberapa asas good governance yang belum sepenuhnya diterapkan, khususnya asas kepastian hukum dan transparansi.

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayustina tahun 2022 dengan judul Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone diketahui bahwa politik kekerabatan sangat berpengaruh besar terhadap kemenangan dalam pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Pengasih cenderung dipengaruhi oleh dua aspek penting yaitu kesadaran politik masyarakat dan keyakinan politik masyarakat. Adapun kesadaran politik masyarakat Desa Pengasih cenderung dipengaruhi letak wilayah sebab Desa Pengasih memiliki dua wilayah yang berbeda yaitu wilayah yang masih termasuk pedesaan dan wilayah yang sudah memasuki perkotaan (Averus & Alfina, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sosial dan ekonomi berpengaruh pada partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Langensari Kota Banjar pada pemilihan Kepala Daerah Kota Banjar tahun 2018 (Purnama & Dewi, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Fatma tahun 2016 diketahui bahwa terdapat pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik.

Secara umum, persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang partisipasi politik dan hubungan interpersonal terhadap pemilihan kepala Desa. Kebaruan dalam penelitian ini adalah pengaruh hubungan interpersonal dan kesadaran politik terhadap partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala Desa di Desa Dameka, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur.

F. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 2, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pasal 25 menyatakan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Pemerintah Desa adalah bagian dari birokrasi Pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai Institusi modern, Pemerintah Desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi dari dimensi kinerja politik dan ekonomi (Iswanti & Zulkarnaini, 2022).

2. Kesadaran Politik

Kesadaran politik merupakan berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, yang dilihat dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik. Kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan/atau pembangunan. Kesadaran politik adalah berbagai pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik. Kesadaran politik merupakan hal yang penting dalam partisipasi politik, termasuk dalam pemilihan Kepala Desa (Ramlan, 2007).

Menurut Budiarjo (2008), kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan

sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan. Kesadaran politik bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh masyarakat, tugas-tugas negara banyak yang terbengkalai. Kesadaran politik sangat berhubungan erat dengan partisipasi politik masyarakat.

Menurut Utsman & Ruslan (2000), terdapat beberapa cara untuk mencapai kesadaran politik, yang dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut:

- a. Arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun non formal, dapat dilakukan melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan, dan pendidikan politik langsung oleh para pemikir dan pemimpin politik.
- b. Pengalaman politik yang didapat dari partisipasi politik juga dapat berkontribusi dalam mencapai kesadaran politik.
- c. Kesadaran politik dapat muncul melalui pembelajaran secara mandiri, seperti membaca koran dan buku-buku tentang politik, serta mengikuti berbagai peristiwa politik.
- d. Dialog-dialog kritis juga dapat memunculkan kesadaran politik.
- e. Selain itu, kesadaran politik juga dapat dicapai melalui dua metode, yaitu magang (magang) dan generalisasi (pemahaman umum). Kombinasi kedua metode ini dapat membantu seseorang dalam mencapai kesadaran politik.

Kesadaran politik meliputi pengetahuan, minat, dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik, sehingga menjadi penting dalam kehidupan negara karena tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks. Tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, banyak tugas negara yang terbengkalai. Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan

hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan pembangunan. Kesadaran politik dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang, sehingga partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya secara rasional dan sesuai dengan aspirasi (Subakti & Ramlan, 2007).

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan partisipasi politik, seperti pemilihan umum, mendorong pendapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta partisipasi melalui masyarakat di lingkungan keluarga dan kemasyarakatan. Partisipasi dilakukan menurut kemampuan, kesiapan, dan kesempatan masing-masing. Setiap warga negara perlu mempersiapkan diri agar mampu berpartisipasi aktif dalam sistem politik yang ada. Partisipasi politik bukanlah dominasi setiap warga negara. Partisipasi politik didasarkan pada kehendak untuk mempengaruhi pemerintah yang berkuasa (Subakti & Ramlan, 2007).

Partisipasi politik merupakan kegiatan warga masyarakat dalam berbagai struktur masyarakat baik disadari maupun tidak untuk mempengaruhi proses-proses politik dalam pengambilan pengambilan kebijakan pemerintah, serta sebagai mekanisme kontrol untuk berlangsungnya dan kehidupan sistem politik. Partisipasi politik dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah

negara. Semakin tinggi partisipasi politik dalam masyarakat dapat menunjukkan kondisi demokrasi yang berkualitas.

Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu dan penyusunan kebijakan sebagai wujud partisipasi politik. Pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan akses informasi agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam sistem politik yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Indonesia, seperti dengan mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat Indonesia.

4. Konsep Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa dapat dianggap sebagai pesta rakyat, di mana tujuan utamanya adalah memilih orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat desa (Sosialismanto, 2001). Dalam konteks ini, pemilihan kepala desa umumnya dilakukan secara langsung oleh penduduk desa, dengan calon yang telah memenuhi persyaratan. Pemilihan kepala desa harus memenuhi prinsip-prinsip seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Proses pemilihan kepala desa meliputi tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Karena itu, pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai upaya untuk menampilkan figur yang dapat melindungi masyarakat desa, dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pemilihan kepala desa adalah suatu proses mutasi yang bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa, dengan tujuan agar dapat memimpin desa. Dalam pemilihan kepala desa, masyarakat desa yang terdaftar memiliki hak untuk memilih langsung calon kepala desa yang dianggap mampu membawa aspirasi dan pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1

dan 2 menyatakan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Partisipasi aktif anggota masyarakat desa sangat penting dalam kesuksesan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Masyarakat desa, baik secara keseluruhan maupun individu, merupakan bagian integral yang penting dalam sistem pemerintahan desa. Prinsip pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah untuk mewujudkan pemilihan rakyat di desa tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya berada di tangan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan aparat pelaksana, tetapi juga di tangan masyarakat desa itu sendiri. Salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat adalah dengan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, yang termasuk di dalamnya adalah melalui partisipasi aktif dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Sirajuddin & Winardi (2011), kepala desa dipilih berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh penduduk desa yang merupakan warga Negara Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau pernah menikah. Prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia ini merupakan landasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah batasan penelitian yang digunakan untuk memfokuskan penelitian agar berjalan sesuai dengan rancangan penelitian yang dibuat. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Pengaruh Hubungan Interpersonal dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Dameka Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau menganalisa data dengan pengantara alat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode

penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa pernyataan dan gambar bukan angka (Sugiyono, 2017). Penelitian akan memuat kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terkait permasalahan yang terjadi di Desa Dameka Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur. Data yang digunakan berasal dari hasil wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, dan dokumentasi resmi. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu studi kasus tentang Pengaruh Hubungan Interpersonal dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Dameka Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji tipe penelitian tertentu melainkan menggambarkan fenomena yang sedang terjadi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman mendalam terhadap suatu masalah yang terjadi. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang objeknya bersifat alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna.

2. Unit Analisis

Menurut Hamidi (2005:75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dari cara mengungkap unit analisis data dengan menetapkan kriteria instrumen tersebut, peneliti dengan sendirinya akan memperoleh siapa dan apa yang menjadi subjek penelitian.

a. Obyek

Objek dalam penelitian ini adalah Pengaruh Hubungan Interpersonal dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Dameka Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur.

b. Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah informan karena lebih spesifik. Informan adalah “orang dalam” pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar lokasi penelitian (Sugiyono, 2017). Teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Subjek penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1

Daftar Informan

NO	Nama	Pendidikan	Umur	Jabatan
1	Matius Bagi Lalupada	SMA	34 Tahun	Kepala Desa
2	Sea Mea Lalu	SMA	44 Tahun	Sekretaris Desa
3	Martinus Oru Bolu	SMA	40 Tahun	Ketua BPD
4	Mata Umbu Goyi, S.Pd	Sarjana	31 Tahun	Kepala Dusun I
5	Palla Umbu Rebu	SMA	45 Tahun	Tokoh Masyarakat
6	Yohanes Umbu Tewu	SMA	50 Tahun	Tokoh Masyarakat
7	Umbu Soru Pekujawang	SMA	49 Tahun	Tokoh Masyarakat
8	Paulina Pari Boka	SMA	40 Tahun	Tokoh Agama

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengamati sesuatu hal yang berkaitan dengan penelitian. Proses mengamati meliputi beberapa hal yaitu mencatat, mendokumentasikan dan mengajukan beberapa pertanyaan yang mencakup penelitian (Creawell & Jhon, 2016).

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data langsung dari sasaran penelitian. Wawancara diperlukan untuk mendukung hasil pengamatan di lapangan, selain itu juga guna menghasilkan penelitian yang objektif. Objektif dalam artian tidak hanya merupakan subjektivitas peneliti ataupun dari narasumber yang tidak puas dengan objek yang di teliti (Creawell & Jhon, 2016).

c. Dokumentasi

Dokumentasi sangat di perlukan pada saat penelitian agar kita memiliki bukti yang jelas. Dokumentasi bentuk *file*, VCD (vidio), dan foto, sehingga dokumentasi tersebut sebagai perbandingan antara data dan dokumen yang ada dalam penelitian ini, mengambil gambar pada saat pengambilan data sekaligus merekam proses pengambilan data (Sugiyono, 2017).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menganalisis dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar hingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti telah disarankan oleh data. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis data secara kualitatif dalam hal ini peneliti memberikan penjelasan, menafsirkan, dan memformulasikan permasalahan penelitian secara induktif (khusus).

Menurut Moleong teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Maka teknik analisis data yang

digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis data yang berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data. Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisir kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar yang membedakan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian – uraian dan mencari hubungan dimensi – dimensi yang ada. Teknik analisis data dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Interpretasi

Interpretasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menggabungkan hasil dari analisis yang dibuat dengan bentuk kriteria pertanyaan, dan standar khusus (Sugiyono, 2017).

b. Validitas Data

Validitas data adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Validitas merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif yang didasarkan pada penentuan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Validitas data berisi hasil penelitian dan sudut pandang peneliti dalam menggambarkan secara menyeluruh hasil penelitian yang dilakukan (Creawell & Jhon, 2016).

BAB II

PROFIL DESA DAMEKA

A. Profil Desa Dameka

Berdirinya Desa Dameka disebabkan oleh pertengkaran dari dua anak raja di Makatakeri Kampung Laitarung. Akibat dari pertengkaran tersebut Umbu Dapa meninggalkan Kampung Laitarung dan mencari tempat tinggal yang baru yaitu Dameka. Seiring berjalannya waktu, tempat tinggal Umbu Dapa menjadi kampung yang besar dan akhirnya mereka membangun sebuah Desa yang diberi nama Desa Dameka. Pada zaman Pemerintahan Belanda, sistem pemerintahan yang dibentuk tidak diberi nama Desa tetapi disebut dengan *Lead Bestuur* yang disingkat menjadi LETTI. Pada waktu itu, orang pertama yang menjadi LETTI adalah Umbu Tewu. Setelah Umbu Tewu meninggal, Pemerintahan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Umbu Sangera hingga tahun 1962. Pada tahun inilah LETTI kemudian diganti menjadi Desa. Mengacu pada beberapa sumber yang ada, Pemerintah di Desa Dameka telah mengalami pergantian kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan Desa Dameka dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Pergantian Kepemimpinan Desa Dameka

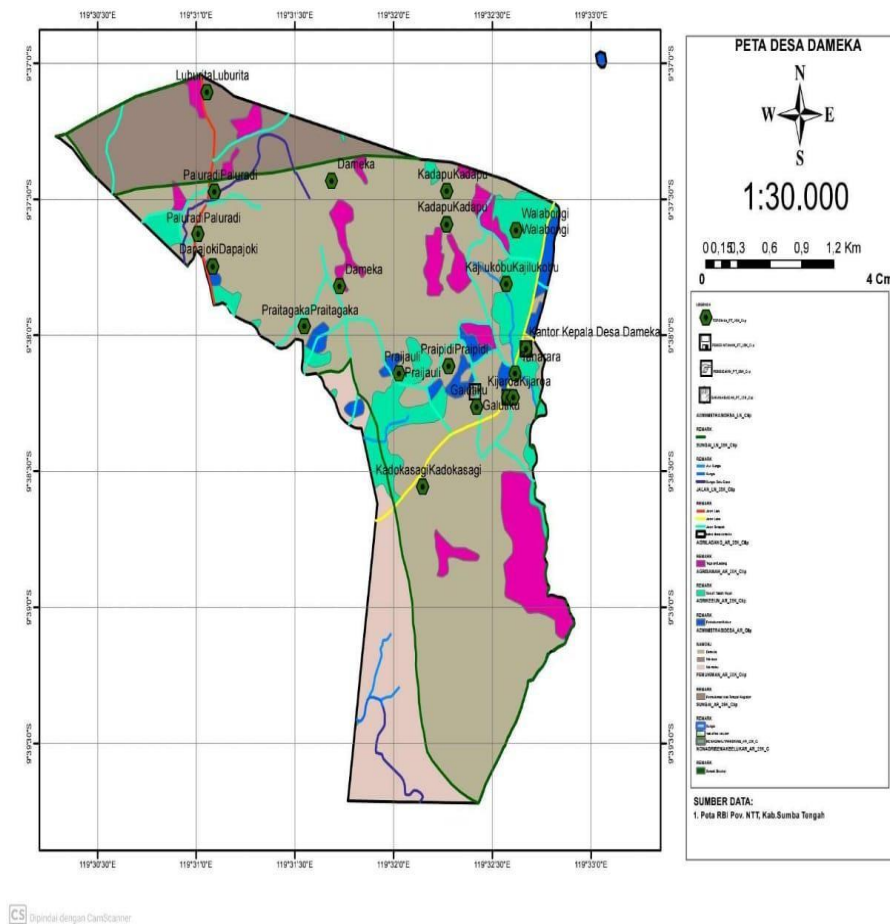
No	Nama Kepala Desa	Periode Menjabat
1	Umbu Sangera	1962-1992
2	Umbu Manaji Napang	1993-2003
3	Yonatan Umbu Gauka, S.Pd	2003-2008
4	Desa Umbu Djama	2008-2014
5	Aili Reku Tibu (PLT)	2015
6	Yonatan Umbu Gauka, S.Pd	2015-2022
7	Matus Bagi Lalupada	2022-2027

Sumber: Data Sekunder Tahun 2023

B. Kondisi Geografis dan Tofografi Desa Dameka

Secara administratif, Desa Dameka berada di Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai luas wilayah 3000 m² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Wailawa
- Sebelah Selatan : Desa Waimanu
- Sebelah Barat : Desa Uumbu Riri
- Sebelah Timur : Desa Wailawa



Gambar 2.1 Kondisi Georafis dan Tofografis Desa Dameka

Desa Dameka adalah sebuah Desa yang terletak di dataran rendah di Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Secara umum Desa

Dameka memiliki curah hujan yang sangat tinggi pada bulan Oktober-Maret. Desa Dameka memiliki 2 Dusun, 6 RW, 12 RT, dan 42 kampung. Luas lahan Desa Dameka yakni 3000 m² yang terdiri dari wilayah untuk sawah, pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Penggunaan lahan di Desa Dameka dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Penggunaan Lahan Desa Dameka

NO	Jenis Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Lahan Pertanian	215
2	Lahan Pertanian Lading	74
3	Lahan Perkebunan	43
4	Perkantoran	160 x 80 m ²
5	Kawasan Hutan Lindung	1.321,115
6	Lahan Pemukiman	187.000

Sumber: Data Sekunder Tahun 2023

C. Kondisi Demografis

Kondisi demografis Desa Dameka memiliki populasi yang beragam. Hal ini ditandai dengan jenis penduduk, agama, tingkat pendidikan, sosial, dan mata pencaharian. Desa Dameka memiliki 384 KK yang terdiri dari 752 laki-laki dan 708 perempuan dengan total jumlah penduduk adalah 1.460 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Dameka adalah petani dan wirausaha. Jumlah penduduk berdasarkan usia dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 5	15	7	22
2	3 – 6	19	23	42
3	7 – 12	46	37	83
4	13 – 15	14	13	27
5	16 – 18	24	39	63
6	10 -18	36	38	74
7	19 -45	66	66	132
8	46 – 65	35	19	54
9	66 – dst	15	11	26

Sumber: Data Sekunder Tahun 2023

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan Terakhir	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	56	69	125
2	SLTP	31	55	86
3	SLTA	89	77	166
4	D2	0	0	0
5	D3	0	2	2
6	S1	12	8	20
7	Buta Huruf	188	211	399

Sumber: Data Sekunder Tahun 2023

D. Sosial Budaya

Penduduk Desa Dameka dicirikan dengan latar belakang yang beragam baik dari segi agama dan tingkat pendidikan. Mayoritas penduduk Desa Dameka adalah Kristen Protestan. Jumlah penduduk berdasarkan kepercayaan yang dianut dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan yang dianut

NO	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Protestan	236	246	482
2	Katolik	21	20	41
3	Islam	1	1	2
4	Hindu	-	-	-
5	Budha	-	-	-
6	Marapu	25	6	31
	Total	283	273	556

Sumber: (Data Sukunder Tahun 2023)

E. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Dameka dibedakan menjadi tiga yaitu sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, dan peribadatan. Sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, dan peribadatan dapat dilihat pada Tabel 2.6, 2.7, dan 2.8

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kesehatan

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Posyandu	1
2	Polindes	1
3	Pustu	1
4	Puskesmas	0

Sumber: Data Sekunder Tahun 2023

Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Pendidikan

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	PAUD/TK	2
2	Taman baca/pos baca	2
3	SD	1
4	SMP	1
5	SMA	0

Sumber: Data Sekunder Tahun 2023

Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Peribadatan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gereja Kristen Protestan	2
2	Gereja Katolik	1
3	Masjid	0

Sumber: Data Sekunder Tahun 2023

F. Keadaan Ekonomi

Pengembangan ekonomi yang ada di Desa Dameka ditopang oleh berbagai sektor yaitu sektor pertanian, Wira Usaha, dan sebagainya. Mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Dameka dapat dilihat pada Tabel 2.9

Tabel 2.9**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Dameka**

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	86	87	173
2	PNS	1	0	1
3	Pensiunan PNS	0	0	0
4	Pengawai swasta	5	4	9
5	Wira usaha	4	16	20
6	Tukang	4	0	4
7	Mebeler	1	0	1
8	Ojek	0	0	0
9	Supir	2	0	2

Sumber: Data Sekunder Tahun 2023

G. Daftar Calon-Calon Kepala Desa Dameka Periode Tahun 2021-2026

Daftar calon-calon kepala Desa Dameka periode tahun 2021-2026 dengan perolehan suara yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10**Daftar Calon-Calon Kepala Desa Dameka Periode Tahun 2021-2026**

NO	Nama Calon Kepala Desa Dameka Tahun 2021	Jumlah Suara		Presentase	
		Sah	Tidak Sah	Sah	Tidak Sah
1	Matus Bagi Lalupada	300	14	33,3%	1,6%
2	Desa Umbu Djama	265	15	29,4%	1,7%
3	Yonathan Umbu Gauka	225	10	25,0%	1,1%
4	Lazarus Lapu Pagegi	71	0	7,9%	
Total		861	39	95,7%	4,3%

Sumber: Data Sekunder Tahun 2023

H. Organisasi-Organisasi dalam Pemerintahan Desa Dameka

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Kepala Desa adalah sebagai pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh

penduduk Desa dan menyelesaikannya untuk menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan dibantu oleh pembantunya yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang wakilnya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kepala Desa sebagai penanggung jawab di bidang pemerintahan, keuangan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengembangkan tumbuhkan jiwa kegotong royongan dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan Desa. Desa Dameka terdiri dari tiga dusun yaitu dusun 1, dusun 2, dan dusun 3 serta terdiri dari 6 RW dan 12 RT.

1. Kepala Desa

Tugas Kepala Desa meliputi menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat desa. Fungsi Kepala Desa antara lain menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti pemerintahan pamong praja, menetapkan peraturan di desa, pengelolaan tanah, menjaga ketentraman dan ketertiban, melindungi masyarakat, administrasi kependudukan, serta mengatur dan mengurus wilayah. Fungsinya juga termasuk melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur perdesaan serta bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, fungsi tersebut meliputi pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, aspek sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam menyusun dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa serta menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi Sekretaris Desa

antara lain menyelenggarakan kegiatan administrasi dan menyiapkan bahan-bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa, melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan, melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara, menyiapkan bantuan penyusunan peraturan desa, menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Kepala Urusan Pemerintah

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengurusan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembangunan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan peraturan di desa. Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan antara lain melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, menyiapkan bahan penyusunan peraturan desa dan keputusan kepala desa, melaksanakan kegiatan tata usaha pertanahan, melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa, menyiapkan pendampingan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan desa, penatausahaan keuangan desa, dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran desa. Fungsi Kepala Urusan Keuangan antara lain melaksanakan penatausahaan keuangan desa, menyiapkan bahan penyusunan anggaran desa, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

5. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyiapan program

keagamaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Fungsi Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat meliputi penyiapan bahan pelaksanaan program keagamaan, penyiapan dan pelaksanaan program pengembangan kehidupan beragama, penyiapan bahan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

6. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

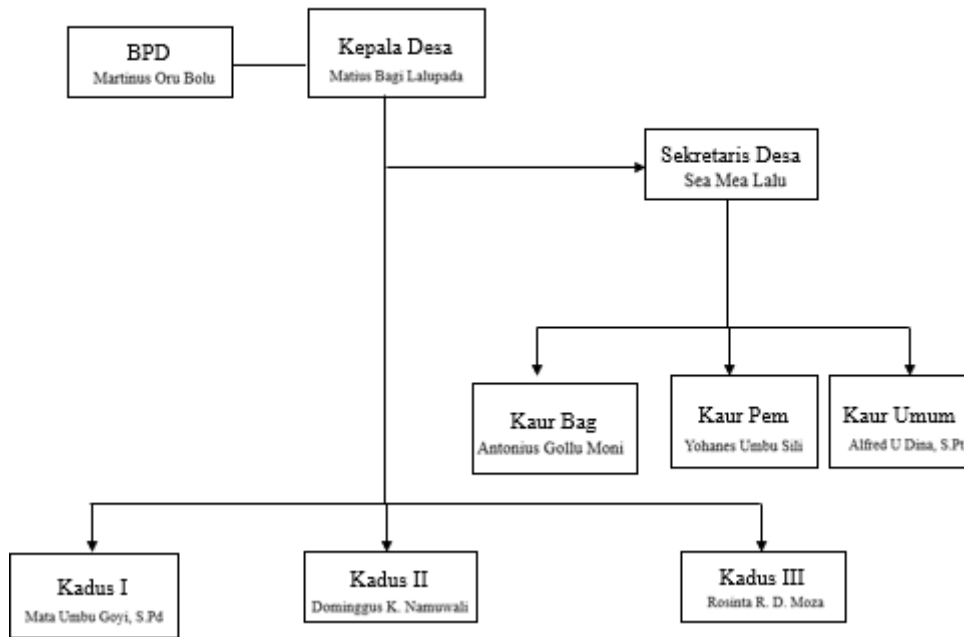
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi seperti penyusunan dokumen, administrasi surat menyurat, pengarsipan, perpustakaan desa, dan menyelenggarakan urusan umum seperti mengatur penatausahaan perangkat desa, menyediakan perangkat desa dan prasarana kantor, menyiapkan rapat, penatausahaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Fungsinya juga meliputi penyediaan data, informasi, dan hubungan masyarakat, pencatatan dan pengelolaan barang habis pakai, inventaris, dan kendaraan dinas, pelayanan administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor dan prasarana desa, penyediaan akomodasi, konsumsi, material, dan kelengkapan pertemuan. , mengelola data, dokumen, dan/atau administrasi kependudukan desa, memberikan pelayanan administrasi dan pencatatan administrasi kependudukan desa, dan memberikan pelayanan hukum administrasi kependudukan desa. penyediaan perangkat desa dan prasarana kantor, persiapan pertemuan, penatausahaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Fungsinya juga meliputi penyediaan data, informasi, dan hubungan masyarakat, pencatatan dan pengelolaan barang habis pakai, inventaris, dan kendaraan dinas, pelayanan administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor dan prasarana desa, penyediaan akomodasi, konsumsi, material, dan kelengkapan pertemuan. , mengelola data, dokumen, dan/atau administrasi kependudukan desa, memberikan

pelayanan administrasi dan pencatatan administrasi kependudukan desa, dan memberikan pelayanan hukum administrasi kependudukan desa. penyediaan perangkat desa dan prasarana kantor, persiapan pertemuan, penatausahaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Fungsinya juga meliputi penyediaan data, informasi, dan hubungan masyarakat, pencatatan dan pengelolaan barang habis pakai, inventaris, dan kendaraan dinas, pelayanan administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor dan prasarana desa, penyediaan akomodasi, konsumsi, material, dan kelengkapan pertemuan. , mengelola data, dokumen, dan/atau administrasi kependudukan desa, memberikan pelayanan administrasi dan pencatatan administrasi kependudukan desa, dan memberikan pelayanan hukum administrasi kependudukan desa

7. Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat : Ada – Aktif
8. Kepala Urusan Pembangunan : Ada – Aktif
9. Dusun : 3 (Aktif)
10. Struktur Pemerintahan Desa Dameka

Struktur Pemerintahan Desa Dameka dapat dilihat pada Gambar 2.2

STRUKTUR PEMERINTAH DESA DAMEKA



Sumber: Administrasi Desa Dameka Tahun 2023

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan:

1. Terdapat pengaruh hubungan interpersonal dan kesadaran politik terhadap partisipasi pemilih dalam Pemilihan kepala Desa di Desa Dameka Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur.
2. Kesadaran politik masyarakat Desa Dameka tergolong tinggi. Hal ini terbukti dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam berbagai kegiatan yang diadakan Pemerintah Desa seperti musyawarah, diskusi politik, dan penentuan calon Kepala Desa.
3. Hubungan interpersonal dan kesadaran politik terhadap partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala Desa berpengaruh signifikan. Hal ini terjadi karena semakin tinggi kesadaran politik dan hubungan interpersonal seorang calon kepala Desa dengan masyarakat maka semakin tinggi tingkat pemilih dalam pemilihan calon Kepala Desa sehingga kemenangan dalam proses pemilihan Kepala Desa juga akan semakin besar.
4. Terdapat golongan masyarakat yang kurang peduli dengan politik yaitu golongan tua. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan terhadap perubahan sosial, keterbatasan informasi, dan pandangan bahwa politik tidak membawa perubahan nyata.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Dameka diharapkan untuk terus melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat Desa Dameka agar dapat terlibat aktif dalam proses pemilihan calon kepala Desa.
2. Bagi masyarakat perlu untuk meningkatkan kesadaran politik melalui pendidikan dan informasi mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan kepala Desa dan masyarakat

dapat terus meningkatkan hubungan interpersonal dengan calon kepala Desa serta dengan sesama agar dapat meningkatkan partisipasi dalam pemilihan kepala Desa.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abdulkarim, A. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Jakarta: Grafindo.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creawell, & Jhon, W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hafied, C. (2011). *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Bandung: Grafindo Persada.
- Ramlan, S. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia.
- Sirajuddin, D. S., & Winardi. (2011). *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press.
- Sosialismanto, D. (2001). *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Subakti, & Ramlan. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&*. Bandung: Alfabeta.
- Utman, A., & Ruslan, M. (2000). *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia.

Jurnal :

- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Moderat*, 6(3):1-26.
- Ayustina, A. (2022). politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Politik*, 1(1):10-19.
- Fajriani, & Tenripadang, A. (2022). Dampak Pemilihan Kepala Deesa Terhadap Hubungan Kekeluargaan di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Perspektif Siyasa Syariyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyah*, 3(1):1-12.
- Fatma, A. N. (2016). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(2):1615-1626.
- Iswanti, S., & Zulkarnaini. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1):92-110.
- Nugraini, N., & Hisbullah. (2021). KSISTENSI ASAS GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah*, 2(3):1-15.
- Purnama, R., & Dewi, M. T. (2020). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Kepala Daereah Pada Masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar Tahun 2018. *Jurnal Moderat*, 6(2):245-252.
- Salasa, K. G. (2018). PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 1(2):1-9.

**INSTRUMEN WAWANCARA TERKAIT PENGARUH HUBUNGAN
INTERPERSONAL DAN KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI
PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA DAMEKA KABUPATEN
SUMBATA TENGAH NUSA TENGGARA TIMUR**

Hari dan tanggal :
Narasumber :
Bentuk : Wawancara Langsung

Lembar wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait pengaruh hubungan Interpersonal Dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Dameka Kabupaten Sumbata Tengah Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan fakta yang ada.

1. Bagaimana kesadaran politik masyarakat di Desa Dameka?
2. Apakah masih ada masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk berpolitik? Jika Ya dan tidak Mengapa hal ini bisa terjadi?
3. Tindakan apa yang dilakukan Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat Desa Dameka?
4. Apakah ada pengaruh hubungan interpersonal antar masyarakat dan calon kepala Desa dalam mensukseskan proses pemilihan kepala Desa Dameka? Jelaskan!
5. Bagaimana hubungan interpersonal tersebut mempengaruhi pemilihan kepala Desa Dameka?
6. Bagaimana tingkat keberhasilan pengaruh hubungan interpersonal dan kesadaran politik terhadap proses pemilihan kepala Desa Dameka?